

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan yang terus mendapat perhatian, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan ekonomi dan infrastruktur. Kondisi tersebut terlihat dari adanya kesenjangan pendapatan yang cukup besar antara kelompok berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Kusmardiyani, 2024). Ketimpangan pendapatan yang tinggi bukan hanya berpengaruh pada aspek ekonomi, namun juga berpotensi mempengaruhi stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal. Fenomena global memperlihatkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan. OECD (2023) mencatat bahwa dalam beberapa dekade terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi di banyak negara menunjukkan peningkatan, namun ketimpangan pendapatan atau pendapatan antar wilayah tetap signifikan atau bahkan meningkat, hal ini menunjukkan bahwa manfaat pembangunan tidak selalu dirasakan secara merata oleh semua kelompok masyarakat dan wilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata-mata dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Meskipun perekonomian nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif positif, manfaat pembangunan belum sepenuhnya terdistribusi secara merata antar wilayah. Ketimpangan ini tercermin dari perbedaan kondisi antara wilayah maju dan perkotaan dengan daerah tertinggal, yang umumnya masih menghadapi keterbatasan kapasitas ekonomi dan fiskal.

Fenomena tersebut sejalan dengan hipotesis Kuznets (1955) yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, peningkatan pertumbuhan sering kali diikuti oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan akibat perbedaan kemampuan wilayah dan kelompok masyarakat dalam mengakses

peluang ekonomi. Ketimpangan tersebut baru cenderung menurun ketika pembangunan telah mencapai tahap yang lebih matang dan bersifat lebih inklusif (Madsen dan Strulik, 2025). Sejalan dengan pandangan tersebut, Todaro dan Smith menegaskan bahwa pembangunan yang efektif dan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga harus mampu mendorong perubahan struktural dalam aspek sosial dan ekonomi guna menurunkan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran (Todaro & Smith, 2020).

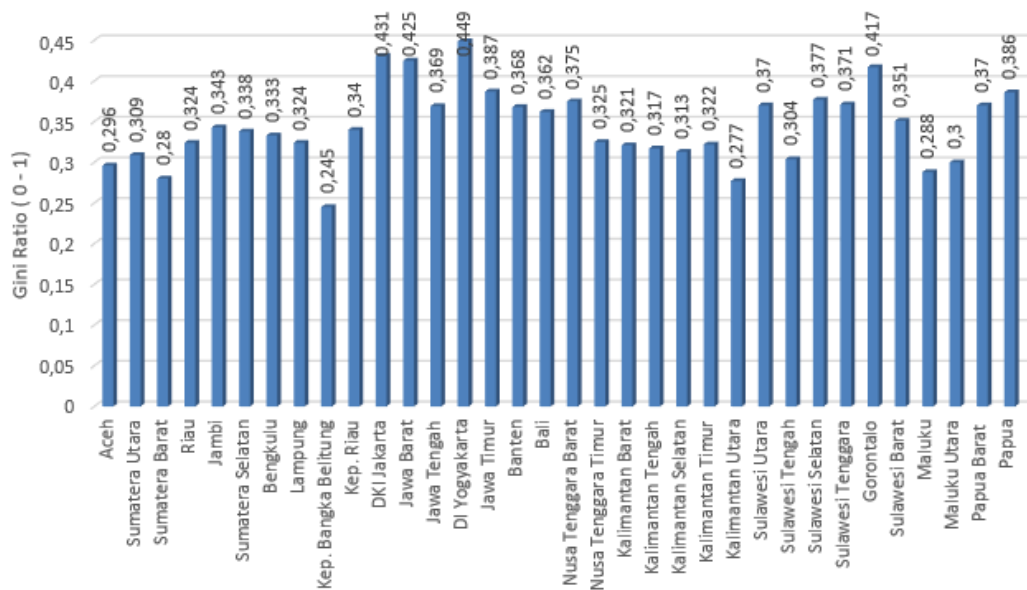
Di Indonesia, untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, pemerintah menggunakan *Indeks Gini Ratio* yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

Tabel 1.1 Klasifikasi Gini Ratio

No	Kategori	Ketimpangan
1	$>0,5$	Tinggi
2	$0,3 - 0,5$	Sedang
3	$<0,3$	Rendah

Sumber : BPS, 2026

Angka Gini Ratio Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) tercatat sebesar 0,388 pada Maret 2023. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan periode 2019-2022 dan berada pada kategori ketimpangan sedang. Kondisi ini mencerminkan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia masih belum merata, baik antar kelompok penduduk maupun antar wilayah. Dengan demikian, perbedaan tingkat pembangunan dan aktivitas ekonomi antar daerah masih berkontribusi terhadap terjadinya disparitas pendapatan, khususnya antara wilayah yang relatif maju dan wilayah yang tergolong tertinggal (BPS, 2023).



Gambar 1.1 Gini Ratio Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Sumber : BPS, 2026

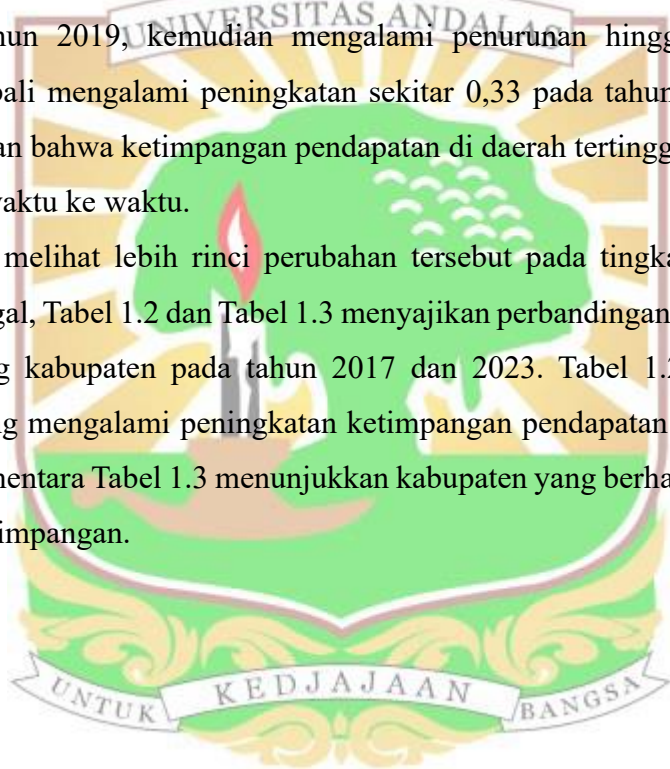
Berdasarkan gambar 1.1 terlihat adanya variasi nilai gini ratio antar provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Beberapa provinsi dengan tingkat aktivitas ekonomi dan urbanisasi yang relatif tinggi, seperti DKI Jakarta (0,431) dan Jawa Barat (0,425), cenderung memiliki nilai Gini Ratio yang relatif tinggi. Sementara itu, sejumlah provinsi yang termasuk dalam wilayah tertinggal, seperti Papua (0,386), Papua Barat (0,370), dan Nusa Tenggara Timur (0,325) memiliki nilai Gini Ratio yang relatif lebih rendah.

Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan bahwa perbedaan karakteristik wilayah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah, di mana daerah yang relatif lebih maju cenderung memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan pendapatan yang lebih tinggi, sementara daerah tertinggal umumnya berada pada kondisi kesejahteraan yang relatif rendah meskipun memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih kecil (Afif, 2022). Namun, nilai ketimpangan yang lebih kecil pada wilayah tertinggal tidak secara langsung mencerminkan kondisi kesejahteraan yang lebih baik, melainkan dapat menunjukkan keterbatasan skala aktivitas ekonomi serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perbedaan nilai Gini Ratio

antar provinsi menunjukkan bahwa permasalahan ketimpangan pendapatan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan, tetapi juga dengan struktur ekonomi dan distribusi pendapatan antar wilayah.

Lebih lanjut, permasalahan ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal tidak hanya perlu dipahami secara statis, tetapi juga secara dinamis. Meskipun secara agregat nilai Gini Ratio di daerah tertinggal tergolong lebih rendah dibandingkan daerah maju, berdasarkan data pada periode 2017-2023, perkembangan rata-rata Gini Ratio daerah tertinggal menunjukkan pola yang berfluktuasi. Rata-rata Gini Ratio meningkat dari 0,30 pada tahun 2017 menjadi 0,33 pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2022, sebelum kembali mengalami peningkatan sekitar 0,33 pada tahun 2023. Pola ini memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal tidak bersifat konstan dari waktu ke waktu.

Untuk melihat lebih rinci perubahan tersebut pada tingkat kabupaten di daerah tertinggal, Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 menyajikan perbandingan nilai Gini Ratio masing-masing kabupaten pada tahun 2017 dan 2023. Tabel 1.2 menunjukkan kabupaten yang mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan selama periode penelitian, sementara Tabel 1.3 menunjukkan kabupaten yang berhasil mencatatkan penurunan ketimpangan.



**Tabel 1.2 Kabupaten Daerah Tertinggal dengan Peningkatan Gini Ratio
Periode 2017-2023**

Kabupaten	2017	2023	Kabupaten	2017	2023
Nias Selatan	0.259	0.261	Puncak Jaya	0.214	0.368
Nias	0.25	0.279	Boven Digoel	0.345	0.417
Musi Rawas Utara	0.276	0.296	Mappi	0.394	0.42
Lombok Utara	0.277	0.283	Asmat	0.233	0.398
Sumba Barat	0.332	0.346	Yahukimo	0.332	0.348
Belu	0.296	0.32	Tolikara	0.299	0.317
Deiyai	0.235	0.367	Keerom	0.358	0.381
Rote Ndao	0.298	0.316	Waropen	0.344	0.407
Sumba Tengah	0.287	0.33	Supiori	0.252	0.362
Sumba Barat Daya	0.288	0.388	Mamberamo Raya	0.203	0.35
Manggarai Timur	0.256	0.281	Nduga	0.212	0.295
Sabu Raijua	0.277	0.303	Mamberamo Tengah	0.225	0.251
Pulau Taliabu	0.243	0.284	Yalimo	0.247	0.343
Teluk Bintuni	0.341	0.383	Puncak	0.177	0.228
Sorong Selatan	0.352	0.42	Dogiyai	0.223	0.381
Tambrau	0.283	0.391	Intan Jaya	0.255	0.394
Pegunungan Arfak	0.274	0.358	Kepulauan Aru	0.277	0.315

Sumber : BPS, 2026

Tabel di atas menunjukkan 34 kabupaten di daerah tertinggal yang mengalami peningkatan Gini Ratio selama periode 2017-2023. Peningkatan tertinggi tercatat di Kabupaten Puncak Jaya dengan perubahan sebesar (0,154) diikuti Kabupaten Boven Digoel (0,072) dan Kabupaten Intan Jaya (0,139). Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun nilai Gini Ratio di daerah tertinggal secara agregat tergolong rendah, sebagian besar kabupaten justru menunjukkan tren ketimpangan yang semakin memburuk dalam kurun waktu tujuh tahun

**Tabel 1.3 Kabupaten Daerah Tertinggal dengan Penurunan Gini Ratio
Periode 2017-2023**

Kabupaten	2017	2023	Kabupaten	2017	2023
Nias Utara	0.268	0.228	Seram Bagian Barat	0.302	0.241
Nias Barat	0.246	0.208	Seram Bagian Timur	0.268	0.244
Kepulauan Mentawai	0.319	0.259	Maluku Barat Daya	0.307	0.191
Pesisir Barat	0.34	0.315	Buru Selatan	0.312	0.276
Sumba Timur	0.333	0.323	Teluk Wondama	0.438	0.403
Kupang	0.33	0.317	Sorong	0.405	0.374
Timor Tengah Selatan	0.287	0.274	Maybrat	0.373	0.37
Alor	0.323	0.266	Manokwari Selatan	0.406	0.378
Malaka	0.273	0.266	Nabire	0.383	0.353
Donggala	0.35	0.237	Paniai	0.46	0.246
Tojo Una-una	0.33	0.262	Pegunungan Bintang	0.336	0.281
Sigi	0.33	0.281	Lanny Jaya	0.309	0.261
Kepulauan Tanimbar	0.317	0.295	Jayawijaya	0.331	0.319
Lembata	0.32	0.303	Kepulauan Sula	0.265	0.261

Sumber :BPS, 2026

Sementara itu, Tabel 1.3 menunjukkan 28 kabupaten yang mencatatkan penurunan nilai Gini Ratio selama periode yang sama. Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Paniai (0,214), Maluku Barat Daya (0,116), dan Donggala (0,113). Meskipun demikian, penurunan Gini Ratio tidak serta-merta mengindikasikan perbaikan kesejahteraan, karena nilai Gini yang rendah juga dapat mencerminkan kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat berada pada tingkat pendapatan yang sama-sama rendah.

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, dari 62 kabupaten daerah tertinggal, sebanyak 34 kabupaten (54,8%) mengalami peningkatan Gini Ratio, sedangkan 28 kabupaten (45,1%) mengalami penurunan selama periode 2017-2023. Temuan ini menegaskan adanya fenomena paradoks ketimpangan di daerah tertinggal di mana nilai Gini Ratio secara agregat tergolong

rendah, namun mayoritas kabupatennya justru menunjukkan tren ketimpangan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Fenomena ini sejalan dengan paradoks pembangunan yang terjadi di daerah tertinggal di mana peningkatan kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan. Di satu sisi, daerah tertinggal merupakan prioritas nasional dalam pembangunan dan menerima alokasi dana transfer fiskal yang relatif besar melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Namun di sisi lain, peningkatan kapasitas fiskal tersebut belum selalu berdampak pada pemerataan pendapatan. Beberapa provinsi dengan karakteristik daerah tertinggal dan penerimaan dana transfer yang besar, seperti Papua Barat dan Maluku Utara justru menunjukkan peningkatan Gini Ratio selama periode 2021 - 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya dana transfer fiskal tidak secara otomatis menjamin pemerataan pendapatan.

Selain faktor fiskal, dinamika ketimpangan pendapatan juga berkaitan dengan kondisi ekonomi daerah dan pola pertumbuhan yang belum sepenuhnya inklusif (Saskia, 2026). Salah satu indikator yang mencerminkan kapasitas ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB mengindikasikan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi, namun pertumbuhan tersebut tidak selalu diikuti oleh pemerataan pendapatan. Sebagai contoh, Provinsi Maluku Utara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan pemerataan pendapatan terbukti dimana masih adanya kabupaten di Maluku Utara yang dikategorikan tertinggal dan angka gini ratio yang meningkat dari tahun 2022-2023. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (BPS, 2024)

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menjadikan wilayah tertinggal sebagai prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, dengan target percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antardaerah (PPN/Bappenas, 2019). Fokus pada daerah tertinggal sejalan dengan agenda global *Sustainable Development Goals*

(SDGs), khususnya *Goals 10 (Reduced Inequalities)* yang menargetkan pengurangan ketimpangan pendapatan dalam dan antardaerah (Development, n.d)

Dalam konteks upaya pembangunan daerah tertinggal, desentralisasi fiskal menjadi instrumen strategis yang diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan menurunkan ketimpangan pendapatan antardaerah. Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan lebih besar dalam mengelola anggaran dan membuat kebijakan lokal, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan memberikan kesempatan setiap wilayah mengembangkan potensi lokal mereka (Fahrizal & Bintoro, 2022). Salah satu implementasi desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberian dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa kepada pemerintah daerah sebagai upaya penguatan kapasitas fiskal.

DAK dirancang untuk memperkuat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tiga komponen yang sangat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan jangka panjang. Daerah tertinggal menerima proporsi DAK yang relatif besar dibanding daerah lain, namun ketimpangan pendapatan masih bertahan. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara sasaran program dan dampak riil yang tercapai di masyarakat. Studi terbaru menekankan bahwa efektivitas DAK sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam mengelola dan menyalurkan program pembangunan secara tepat sasaran (Falia et al., 2025).

DAU memegang peranan sentral dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan tujuan mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah, DAU idealnya mampu mendorong pemerataan pembangunan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah yang bersumber dari DAU masih terserap pada belanja rutin seperti gaji pegawai, sehingga kontribusinya terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat tidak selalu optimal (M. A. M. Ridho & Wijayanti, 2022). Sementara itu, dana desa menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan transfer fiskal pemerintah pusat, terutama bagi daerah tertinggal yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal dan

pembangunan. Melalui dana desa, pemerintah berupaya mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat serta penguatan ekonomi lokal. Secara teori, dana desa diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan karena alokasi anggarannya diarahkan langsung kepada masyarakat desa dan wilayah yang relatif tertinggal. Namun demikian, efektivitas dana desa dalam menurunkan ketimpangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kapasitas pengelolaan antar wilayah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan dana untuk kegiatan produktif, khususnya pada daerah tertinggal (Benardin & Aitasari, 2023).

Kondisi ketimpangan pendapatan pada periode penelitian juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada tahun 2020. Pandemi menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi dan penurunan pendapatan masyarakat di berbagai daerah, terutama pada wilayah tertinggal yang memiliki keterbatasan kapasitas ekonomi. Dalam kondisi tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi dana transfer seperti DAU, DAK, dan dana desa untuk mendukung penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 turut memengaruhi dinamika ketimpangan pendapatan selama periode penelitian (Dwi Putra Santoso & Mukhlis, 2021).

Disamping faktor fiskal yang memengaruhi distribusi pendapatan di daerah tertinggal, dinamika ketimpangan juga dipengaruhi oleh kualitas pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan capaian masyarakat dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas serta kesempatan ekonomi masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan dan pendapatan sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat (Adeleye, 2024).

Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa pembangunan manusia memiliki hubungan erat dengan distribusi pendapatan. Penelitian Naz

(2023) menemukan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat membantu menekan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan akses ekonomi masyarakat. Namun, pada konteks negara berkembang, hubungan tersebut tidak selalu konsisten. Di beberapa wilayah, peningkatan IPM justru cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang telah memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih baik sehingga ketimpangan pendapatan tetap bertahan sehingga berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan (Marti'ah, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan masih perlu ditelusuri lebih lanjut, khususnya pada daerah tertinggal di Indonesia yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik.

Pentingnya pembangunan manusia ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya Goal 10: *Reduced Inequalities*, yang menekankan pentingnya pengurangan ketimpangan melalui pembangunan yang inklusif dan merata. Dengan demikian, rendahnya IPM di daerah tertinggal tidak hanya mencerminkan keterbatasan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting yang dapat menjelaskan mengapa ketimpangan pendapatan masih bertahan meskipun berbagai program pembangunan telah dijalankan. Fokus pada variabel IPM dalam penelitian ini turut memperkuat relevansinya terhadap upaya pencapaian pembangunan yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan mempertimbangkan seluruh dimensi tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis yang lebih komprehensif terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal melalui kombinasi variabel fiskal (DAU, DAK, Dana Desa), ekonomi (PDRB), sosial-demografis (IPM) dan pandemi (COVID-19). Pendekatan ini belum banyak dikaji secara simultan oleh penelitian sebelumnya, terutama untuk periode 2017-2023. Selain memperkaya kajian akademik, penelitian ini juga berkontribusi pada evaluasi kebijakan pembangunan daerah sesuai arah RPJMN 2020-2024, yang menempatkan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai prioritas nasional, serta mendukung pencapaian *SDGs Goal 10: Reduced Inequalities*.

Atas dasar uraian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Determinan Ketimpangan Pendapatan Daerah Tertinggal di Indonesia (2017-2023)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal?
3. Apakah Dana Desa memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal?
4. Apakah IPM memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal?
5. Apakah PDRB memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal.
2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal.
3. Menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal.
4. Menganalisis pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal.
5. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diupayakan dapat menjadi sarana untuk menerapkan ilmu selama masa perkuliahan, dan juga sebagai pengalaman bagi penulis dalam melakukan penelitian terkait dengan determinan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia khususnya di daerah tertinggal.

b. Bagi Masyarakat

Studi ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami pentingnya pengelolaan dana transfer, pentingnya Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dalam pemerataan pendapatan di daerah tertinggal. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong peningkatan literasi ekonomi masyarakat dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, terutama di daerah yang masih tertinggal secara ekonomi.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan yang berguna bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan secara lebih inklusif dan berbasis data yang ada untuk dapat mengatasi ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal. Sehingga diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal.

d. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman fenomena ketimpangan pendapatan. Penelitian ini akan meninjau literatur dengan menambahkan perspektif baru terkait determinan ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal.